

## PENGARUH KESADARAN POLITIK MAHASISWA STKIP PGRI NGANJUK TAHUN 2015-2016 TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2013

<sup>1</sup>Ratna Pramitasari, <sup>2</sup>Yudha Harnanto

<sup>1,2</sup>STKIP PGRI Nganjuk, Indonesia

Email: pramitasari01@gmail.com

### Abstrak

Generasi muda merupakan generasi pewaris nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan penerus cita-cita bangsa serta insan pembangunan termasuk di dalamnya mahasiswa. Memahami kesadaran politik mahasiswa sebagai pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah perlu kiranya diaktualisasikan melalui pembelajaran yang melibatkan langsung diri mahasiswa terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan anggota dan aktivitas keluarga atau masyarakat. Dalam mengkaji rendahnya partisipasi politik mahasiswa, sangat mungkin terjadi karena peran partai politik dalam pendidikan politik warga negara masih masif, dan sangat menggantungkan kepada pemerintah melalui pendidikan formal. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi Pancasila merupakan wahana pemanfaatan hak politik warga negara yang dijamin, oleh peraturan perundangan perlu ditingkatkan partisipasi politiknya. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tempat penelitian yang digunakan adalah STKIP PGRI NGANJUK, sedangkan subyek penelitian adalah kesadaran politik mahasiswa dan pemilihan kepala daerah. Obyek penelitiannya adalah mahasiswa STKIP PGRI NGANJUK program studi Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis statistik yaitu teknik kolerasi, setelah diperoleh hasil observasi selanjutnya adalah menginterpretasikan nilai "r" hasil observasi dengan cara mengkonsultasikan dengan nilai "r" product, yang ada pada tabel dengan batas penolakan N=40. Ternyata hasil yang diperoleh setelah dikonsultasikan 5% sebesar 0,312 dan untuk taraf signifikansi 1% sebesar 0,403. Dengan demikian ternyata nilai hasil observasi lebih besar dari nilai yang ada dalam tabel, maka hipotesis kerja yang diajukan dapat diterima dan menolak hipotesis nihil (Ho). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang positif antara kesadaran politik mahasiswa STKIP PGRI NGANJUK tahun 2015-2016 terhadap tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nganjuk tahun 2013.

**Kata Kunci : Kesadaran Politik, Pemilihan Kepala Daerah.**

### Pendahuluan

Generasi muda merupakan generasi pewaris nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan penerus cita-cita bangsa serta insan pembangunan termasuk di dalamnya mahasiswa. Hal ini mengingatkan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan politik bangsa. Sejarah telah mencatat dan membuktikan peran serta kepeloporan mahasiswa ikut serta membela bangsa dan negara. Hal yang menarik dan perlu diperhatikan

adalah peran dan kepeloporan mahasiswa sebagai produk jaman itu sendiri, dengan tantangan yang berbeda dari waktu ke waktu. Pada dasarnya fungsi gerakan mahasiswa adalah sebagai proses perubahan yaitu menumbuh kembangkan perubahan sosial dan mendorong perubahan sistem pembangunan politik bangsa. Di sisi lain dalam dasa warsa terakhir ini, ditandai adanya penurunan minat dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan politik. Hal ini dapat dicontohkan dalam pemilihan anggota dewan perwakilan mahasiswa atau senat, dan pemilihan presidium badan eksekutif mahasiswa, yang terlibat di dalamnya sebatas para aktivis mahasiswa atau sebagian mahasiswa bukan keseluruhan mahasiswa.

Dalam mewujudkan misi ini, dilaksanakan melalui pembangunan sistem politik yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik, keteladanan dan kaderisasi, memantapkan etika dan moral budaya politik yang berdasarkan Pancasila, meningkatkan peran serta politik masyarakat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan sistem politik yang berdasarkan budaya politik terbuka adalah optimalisasi pendidikan demokrasi bagi mahasiswa, dengan ditandai adanya perbedaan pendapat dan kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan dijamin dalam peraturan perundangan. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut faham demokrasi, sebagai negara demokrasi tidak cukup hanya dengan rumusan formalnya saja, tetapi harus nampak dalam praktek penyelenggaraan Negara, sehingga tindakan penguasa dan pemerintahan dituntut untuk melaksanakan kaidah-kaidah demokrasi sesuai dengan landasan idiil, yuridis konstitusional, serta kebijakan politik negara.

Pemilihan kepala daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya dengan memberi peran yang lebih efektif kepada organisasi peserta pemilihan umum, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Menurut Joko J. Prihatmoko bahwa : “pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi Pancasila merupakan wahana pemanfaatan hak politik warga negara yang dijamin, oleh peraturan perundangan perlu ditingkatkan partisipasi politiknya”. Pemilihan kepala daerah untuk

pemilihan anggota legislatif dari tingkat pusat sampai daerah, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah menjadi barometer keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan politik bangsa.

Permasalahan yang muncul dalam pemilihan kepala daerah langsung merupakan permasalahan politik yang aktual dan faktual berkembang dalam dasa warsa terakhir ini. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, pemilihan kepala daerah juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kehidupan demokrasi menjadi lebih baik, mahasiswa juga dapat dengan bebas menyalurkan pendapatannya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang pada masa orde baru sangat dibatasi. Kelahiran pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi dilevel lokal. Tip O'Neill, dalam suatu kesempatan, menyatakan bahwa "All Politicis Local" yang dapat dimaknai sebagai demokrasi di tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi di tingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrument dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dahulu terbentuk. Menurut Leo Agustino (2013:17) kebangkitan demokrasi politik di Indonesia (secara dan aktual) diawali dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, asumsinya sebagai upaya membangun pondasi demokrasi di Indonesia (penguatan demokrasi di ranah lokal). Dalam mengkaji rendahnya partisipasi politik mahasiswa, sangat mungkin terjadi karena peran partai politik dalam pendidikan politik warga negara masih pasif, dan sangat menggantungkan kepada pemerintah melalui pendidikan formal. Apabila hal ini, tidak segera dicari solusinya, timbul kekhawatiraan apa yang dicita-citakan negara pada masa demokrasi ini akan semakin sulit terwujud.

### **Metode Penelitian**

Desain pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan Sugiyono (2012:14). pengambilan sampel peneliti menggunakan sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dari penjelasan di atas, sampel yang peneliti gunakan adalah 40 mahasiswa mahasiswa STKIP PGRI NGANJUK tahun 2015-2016 khususnya program studi Pendidikan Kewarganegaraan, dari semester II (dua), semester IV (empat), dan semester VI (enam). Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan angket.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Data tentang kesadaran politik menunjukkan skor terendah yang dicapai sebesar 51 dan skor tertinggi sebesar 68. Variabel kesadaran politik dibedakan dalam lima kategori yaitu : tinggi, cukup, agak rendah, rendah dan sangat rendah. Kategori ini berdasarkan pada besarnya simpangan baku ideal dan skor dan skor tertinggi. Data tentang pemilihan kepala daerah menunjukkan skor terendah yang dicapai sebesar 51 dan skor tertinggi sebesar 67.

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya mahasiswa STKIP PGRI NGANJUK tahun 2015-2016 khususnya program studi Pendidikan Kewarganegaraan, yang ikut bersuara dalam tingkat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nganjuk tahun 2013 tergolong agak rendah. Ini terlihat pada data pemilihan kepala daerah pada interval ketiga, yaitu sebesar 58-60 pada kategori agak rendah sebesar 47,5%. Variabel pemilihan kepala daerah dibedakan dalam lima kategori, yaitu : tinggi, cukup, agak rendah, rendah dan sangat rendah. Kategori ini berdasarkan pada besarnya simpangan baku ideal dan skor dan skor tertinggi.

Setelah diperoleh hasil observasi selanjutnya adalah menginterpretasikan nilai “r” hasil observasi dengan cara mengkonsultasikan dengan nilai “r” product, yang ada pada tabel dengan batas penolakan  $N=40$ . Ternyata hasil yang diperoleh setelah dikonsultasikan 5% sebesar 0,312 dan untuk taraf signifikansi 1% sebesar 0,403. Dengan demikian ternyata nilai hasil observasi lebih besar dari nilai yang

ada dalam tabel tersebut, maka hipotesis kerja yang diajukan dapat diterima dan menolak hipotesis nihil ( $H_0$ ).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Adanya pengaruh yang positif antara kesadaran politik mahasiswa STKIP PGRI NGANJUK tahun 2015-2016 terhadap tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nganjuk tahun 2013”.

Budaya politik yang berkembang di masyarakat akan selalu berkaitan dengan kesadaran politik. Pada hakekatnya budaya politik merupakan cerminan dari kesadaran politik suatu masyarakat terhadap sistem politik yang sedang berlaku. M.Taopan dalam tulisannya yang berjudul “kesadaran politik” (2011:45) menyatakan bahwa : “kesadaran politik merupakan proses batin yang menampilkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara”. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat begitu kompleks dan beratnya tugas yang dipikul negara dalam hal ini para penyelenggara negara.

Kesadaran politik masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pemilihan umum. Akan tetapi diukur juga dari peran serta mereka dalam mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintah selama memegang kekuasaan pemerintahan. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda. Kesadaran politik masyarakat sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi cenderung mempunyai kesadaran politik yang relatif tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, maka kesadaran politiknya pun relatif rendah sehingga memerlukan pembinaan.

Saat ini demonstrasi tidak dilarang karena itu adalah hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemimpinnya. Gejala budaya politik pun berkembang di Indonesia. Budaya politik masyarakat pedesaan atau pedalaman biasanya tergantung pada pilihan politik pemimpinnya, baik pemimpin adat, suku, maupun agama. Begitu pula budaya politik yang berkembang di masyarakat perkotaan yang beragam dengan pilihan politik yang tidak lagi bergantung pada pilihan orang lain. Ada perbedaan tingkat kesadaran dan partisipasi politik antara

masyarakat pedesaan dan perkotaan. Perbedaan ini akan menggambarkan perbedaan budaya politik yang berkembang di kedua masyarakat tersebut. Budaya politik dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama dimana masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bahwa berdasarkan hasil angket yang disebar, menunjukkan tentang kesadaran politik mahasiswa STKIP PGRI NGANJUK tahun 2015-2016, tergolong cukup baik. Hal ini terbukti dari jawaban angket yang diterima dari para responden mereka memberikan alternatif jawaban a dan b, (2) mengenai hasil angket mahasiswa STKIP PGRI NGANJUK terhadap tingkat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nganjuk tahun 2013, menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan nilai rata-rata 56,775, (3) berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis statistik dengan rumus "Korelasi Product Moment" dapat diterima kebenarannya, yakni ; semakin baik kesadaran politik mahasiswa, maka semakin baik tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah, dan sebaliknya semakin buruk kesadaran politik mahasiswa, maka semakin buruk pula tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Sitepu 2012. *Student Government*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kosasih. 2011. *Partisipasi Politik Mahasiswa*. Semarang : Rajawali Perss.
- Joko J. Prihatmoko. 2013. *Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Undang-Undang nomer 8 tahun 2015, tentang "pemerintahan daerah sebagai acuan dasar, dan sekaligus menandakan pemilihan kepala daerah".
- Putra. 2014. *Pergulatan Politik*. Semarang : Rajawali Perss.
- Bakry. 2011. *Filsafat Negara Pancasila*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Darmodiharjo. 2012. *Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta : Rajawali Perss.
- Leo Agustino. 2013. *Kesantunan Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Polma. 2013. *Partisipasi Politik Mahasiswa*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Arikunto. 2010. *Statistik Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

M.Taopan. 2011. *Kesadaran Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang pasal 10 nomor 8 tahun 2015, menyatakan tentang “*pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah*”.

Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 dalam pasal 1 sampai dengan pasal 7, berisi tentang “*prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah*”.

Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, tentang “*pemerintahan daerah*” khususnya pada pasal 3 ayat (1) dikemukakan bahwa, “*masa persiapan pemilihan kepala daerah berpedoman pada peraturan daerah*”.

Umberto. 2012. *Pandangan Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Hamit Darmadi. 2011. *Hipotesis*. Semarang : Rajawali Perss.

Sugiyono. 2012. *Teknik Kuantitatif*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Arikunto. 2010. *Variabel Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Hamit Darmadi. 2011. *Teknik Analisis Data*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.